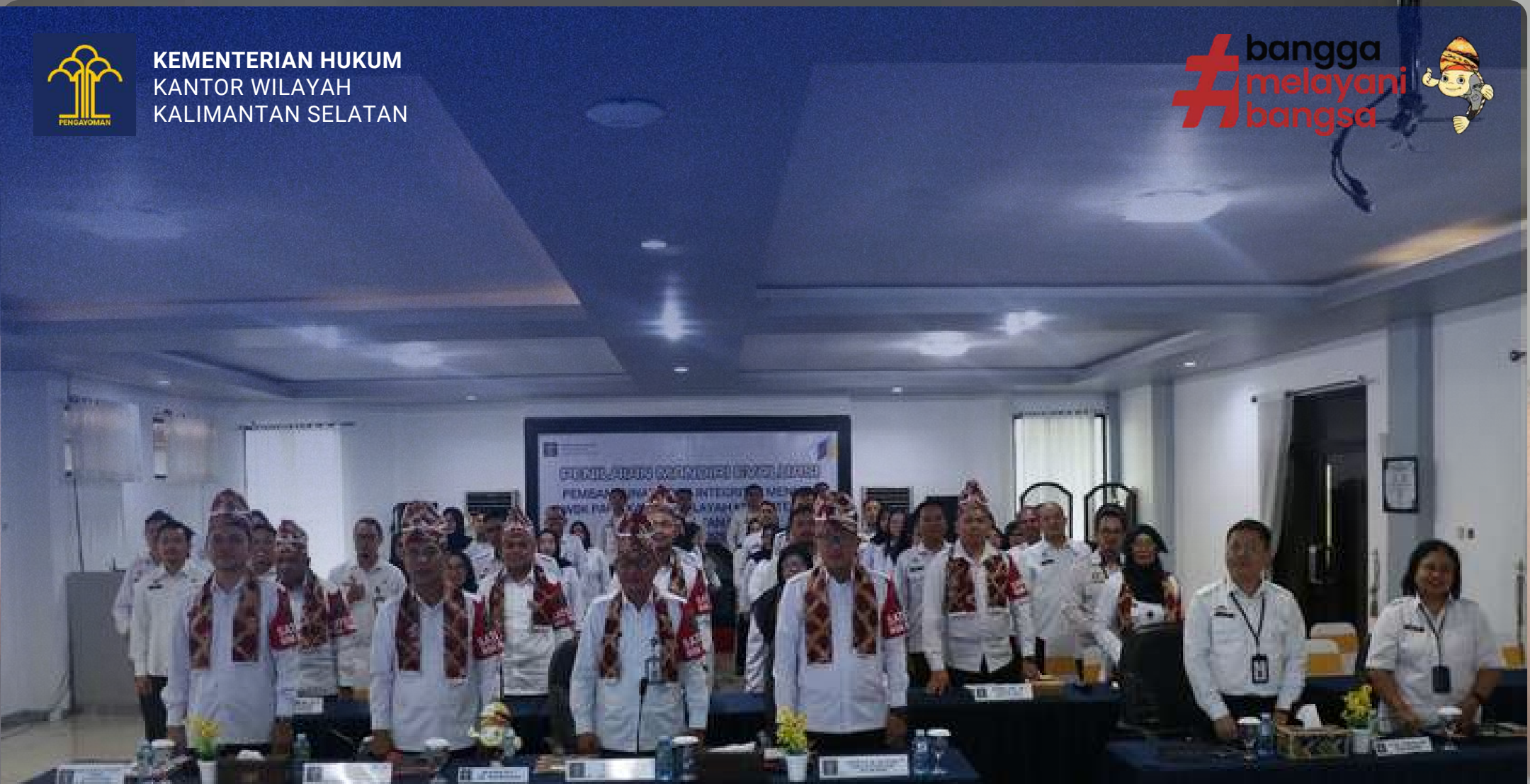
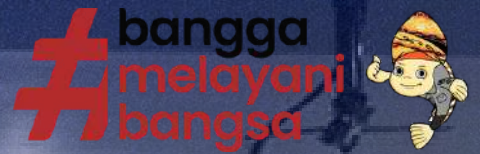




KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN



KEMENKUM KALSEL NEWS

MINGGU KE-

2

OKTOBER 2025

BULETIN



KANWIL KEMENKUM KALSEL
HARMONISASI RANPERDA
KAWASAN TANPA ROKOK



KEMENKUM KALSEL TINGKATKAN
KESADARAN MEREK DAN HKI BAGI
UMKM TANAH LAUT



RAPAT DARING
PENATAAN ORGANISASI KANTOR
WILAYAH

DIVISI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAAN HUKUM

DIVISI
PELAYANAN HUKUM

BAGIAN
TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id

Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Apel Pagi, Tekankan Integritas dan Pelayanan Prima



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan apel pagi pada Senin (06/10/2025) bertempat di Halaman Kantor Wilayah. Kegiatan apel yang rutin dilaksanakan setiap awal pekan ini diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat struktural.

Bertindak sebagai Pembina Apel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah, sementara Sri Yunita bertugas sebagai Pemimpin Apel.

Dalam amanatnya, Meidy Firmansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai atas kedisiplinan dan kehadiran dalam apel pagi. Menurutnya, kehadiran tersebut merupakan bentuk nyata dari integritas dan tanggung jawab sebagai ASN Kementerian Hukum.

Lebih lanjut, Meidy mengingatkan agar seluruh jajaran senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mengingat mystery guest dapat hadir kapan saja untuk menilai langsung kualitas pelayanan yang diberikan.

Selain itu, Meidy juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian Kantor Wilayah yang telah berhasil menyelesaikan tahapan evaluasi mandiri dalam penilaian wawancara WBK Tahun 2025. Ia mendorong agar seluruh pegawai terus mempersiapkan diri dengan baik untuk tahap berikutnya, sehingga Kanwil Kemenkum Kalsel dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Apel pagi ditutup dengan doa dan ajakan untuk terus memperkuat semangat kolaborasi, integritas, serta pelayanan prima demi terwujudnya birokrasi berkelas dunia di lingkungan Kementerian Hukum.



Perkuat Identitas Koperasi, Kanwil Kemenkum Kalsel Dorong Fasilitasi Merek Kolektif

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat internal pada Senin (6/10) di Ruang BerAKHLAK, dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-AH.10.02-142 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Kemudahan Pendaftaran Merek Kolektif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, dan diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, beserta para pejabat fungsional dari Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Kalsel.

Rapat ini membahas langkah strategis implementasi Surat Edaran Menteri Hukum, termasuk pembentukan Tim Fasilitasi Pendaftaran Merek Kolektif Koperasi Merah Putih, penyusunan jadwal pelayanan jemput bola, serta koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Dalam arahannya, Meidy menegaskan bahwa perlindungan merek kolektif merupakan instrumen penting dalam memperkuat identitas dan daya saing koperasi daerah.

“Rapat ini menjadi pijakan awal bagi Kanwil Kemenkum Kalsel untuk memastikan seluruh koperasi di daerah memiliki identitas hukum yang kuat melalui perlindungan merek kolektif. Kita ingin koperasi di desa maupun kelurahan tak hanya tumbuh, tapi juga berdaya saing dan terlindungi secara hukum,” ujar Meidy Firmansyah.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pendekatan jemput bola akan menjadi kunci utama dalam mempercepat pendaftaran merek kolektif bagi koperasi.

“Langkah jemput bola memastikan pelayanan merek kolektif dapat menjangkau langsung koperasi di daerah. Ini juga bagian dari komitmen kami menghadirkan layanan hukum yang adaptif dan kolaboratif,” imbuhnya.

Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan perlindungan kekayaan intelektual bagi koperasi daerah, sebagai bagian dari upaya mendorong ekonomi lokal menuju Indonesia Emas 2045.



WTP ke-16, Akhir 'Manis' Kemenkumham Sebelum Transformasi Kelembagaan

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2024. Capaian ini merupakan yang ke-16 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009, sekaligus menjadi capaian terakhir Kemenkumham sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

“Capaian ini sekaligus menjadi capaian terakhir opini WTP Kementerian Hukum dan HAM sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian, sehingga menjadi penutup yang baik bagi perjalanan panjang tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jumat (03/10/2025).

Menurut Supratman, pemeriksaan dari BPK menolong kementerian dan lembaga dalam pengelolaan keuangan negara agar transparan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Proses ini merupakan bentuk pengendalian untuk menjamin anggaran publik digunakan secara bertanggung jawab.

“Pemeriksaan BPK RI memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik, efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Supratman.

“Pemeriksaan laporan keuangan merupakan bentuk pengendalian demokratis yang menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik, serta menjadi sarana perbaikan berkelanjutan atas sistem birokrasi dan pengelolaan keuangan publik,” tambahnya.

Supratman mengatakan bahwa salah satu tugas penting pasca pemisahan kementerian adalah proses likuidasi eks satuan kerja Kemenkumham. Dari total 1.167 satuan kerja (satker), telah selesai proses likuidasi sebanyak 1.020 satker hingga 2 Oktober 2025. Sehingga, masih terdapat 147 satker yang belum dilikuidasi. Oleh karena itu, Supratman mengajak ketiga kementerian untuk meningkatkan sinergi dan komitmen agar proses likuidasi dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

“Salah satu tugas penting terkait penyelesaian administratif dan akuntabilitas keuangan yang perlu kita lakukan bersama adalah melaksanakan proses likuidasi eks satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan likuidasi sebagai bentuk penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing,” kata Menteri kelahiran Sulawesi Selatan ini.

Supratman juga mengajak ketiga kementerian untuk senantiasa menindaklanjuti rekomendasi atas temuan-temuan dari BPK agar tidak menjadi temuan berulang di masa-masa mendatang. Baginya, rekomendasi BPK dapat dijadikan panduan dalam perbaikan tata kelola keuangan negara. Ia menyatakan bahwa seluruh rekomendasi bagi Kementerian Hukum pasti akan ditindaklanjuti.



“Seluruh langkah tindak lanjut agar dilakukan secara konsisten, berbasis data, dan terintegrasi dalam sistem pengawasan internal, agar tidak menjadi temuan berulang di masa yang akan datang. Khusus di Kementerian Hukum, kami sampaikan bahwa semua rekomendasi pasti akan ditindaklanjuti,” ucapnya.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, memberikan apresiasi atas capaian opini WTP Kemenkumham yang ke-16 tersebut. Nyoman juga melaporkan bahwa Kementerian Hukum telah menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sebanyak 91,39%, serta sebesar 92,16% telah diselesaikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

“Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang Bapak, Ibu (Kemenkumham) kelola, sudah memenuhi unsur-unsur untuk mendapat predikat WTP. Ini yang ke-16 berturut-turut dan terbanyak di Republik Indonesia,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pada tahun anggaran 2024, Kemenkumham masih diperiksa sebagai satu kementerian. Mulai tahun anggaran 2025, masing-masing kementerian telah memulai pelaksanaan tugas dan fungsi secara mandiri, termasuk dalam penyusunan laporan keuangannya. Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi atas capaian opini WTP ke-16 yang diraih Kementerian Hukum RI sebelum transformasi kelembagaan.

“Prestasi ini menjadi penutup yang manis sekaligus bukti nyata bahwa tata kelola keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara telah berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami di daerah siap mendukung penuh arahan Bapak Menteri, termasuk dalam penyelesaian proses likuidasi eks satker secara tertib serta menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara konsisten,” ujarnya.

Wujudkan Organisasi yang Adaptif, Kanwil Kemenkum Kalsel Bahas Penataan Struktur Internal



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar rapat pembahasan usulan penataan organisasi sebagai tindak lanjut atas surat Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI Nomor SEK.1-OT.01.02-547 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Permintaan Usulan Penataan Organisasi Kantor Wilayah, bertempat di Ruang Rapat Kakanwil, Senin (6/10/25).

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, dan dihadiri oleh Pejabat Manajerial serta Non Manajerial di lingkungan Kanwil. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun arah kebijakan dan kerangka usulan penataan organisasi yang adaptif terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan nyata di lapangan.

Dalam arahannya, Alex Cosmas Pinem menegaskan bahwa penyesuaian struktur organisasi di lingkungan Kantor Wilayah menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik di bidang hukum.

“Kita perlu memastikan struktur organisasi di wilayah ini benar-benar mencerminkan kebutuhan riil, mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, dan sejalan dengan arah kebijakan kelembagaan Kementerian Hukum RI. Penataan organisasi bukan hanya soal perubahan struktur, tetapi juga tentang bagaimana kita memperkuat fungsi dan sinergi antar unit untuk menghasilkan kinerja yang berdampak,” ujar Alex.

Surat Sekretariat Jenderal tersebut merujuk pada sejumlah peraturan baru, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum. Selain itu, dua regulasi turunan yakni Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum juga menjadi dasar penyesuaian di tingkat wilayah.

Rapat membahas beberapa hal penting, antara lain identifikasi kebutuhan struktur dan fungsi organisasi, perumusan matriks usulan perubahan unit kerja, serta penyusunan naskah urgensi penataan organisasi yang akan disampaikan ke Sekretariat Jenderal. Para Kepala Divisi dan perwakilan unit kerja turut memberikan masukan terkait pembagian fungsi.

Sebagai hasil awal, rapat menyepakati akan merumuskan matriks perubahan dan menyiapkan naskah pendukung untuk dikirimkan ke Sekretariat Jenderal paling lambat pada 15 Oktober 2025, sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Melalui pembahasan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menunjukkan komitmen dalam mewujudkan organisasi yang semakin efisien, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan hukum di daerah, sejalan dengan semangat reformasi kelembagaan dan transformasi birokrasi yang digagas oleh Kementerian Hukum RI.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif Peningkatan Akurasi Data Pemilik Manfaat Korporasi

Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah beserta jajaran mengikuti secara daring Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif dalam Peningkatan Akurasi Data Pemilik Manfaat Korporasi, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI, pada Senin, 6 Oktober 2025 melalui aplikasi Zoom Meeting.

Kegiatan nasional ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola administrasi hukum umum dan memastikan keakuratan data Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat Korporasi) sebagai upaya mendukung transparansi korporasi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta pendanaan terorisme (TPPT).

Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa Kementerian Hukum RI kini mengelola lebih dari 3,3 juta entitas badan usaha, dan berperan penting dalam memastikan pelaporan pemilik manfaat korporasi berjalan transparan dan akuntabel.

Kegiatan yang dihadiri oleh para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Notaris dari seluruh Indonesia ini dibuka oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, serta menampilkan sejumlah agenda penting, di antaranya penandatanganan perjanjian kerja sama antar instansi, peluncuran Verifikasi Pemilik Manfaat (BO Gateway), dan keynote speech dari Menteri Hukum RI.

Selain itu, forum ini turut menghadirkan narasumber dari PPATK, STRANAS PK, Kementerian ESDM, serta PT Pertamina (Persero) yang membahas strategi dan tantangan peningkatan akurasi data pemilik manfaat dalam mendukung tata kelola korporasi yang transparan.

Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyambut baik pelaksanaan forum ini dan menegaskan komitmen Kanwil untuk mendukung pelaporan dan pembaruan data pemilik manfaat di wilayah Kalimantan Selatan.

“Transparansi dan akurasi data pemilik manfaat korporasi adalah bagian penting dari upaya kita membangun kepercayaan publik terhadap dunia usaha dan memastikan tata kelola hukum yang bersih dan akuntabel. Kanwil Kemenkum Kalsel siap memperkuat koordinasi dengan para notaris dan pemangku kepentingan di daerah dalam implementasinya,” ujar Alex.

Dengan adanya forum ini, diharapkan sinergi lintas kementerian, lembaga, dan sektor swasta semakin kuat dalam menciptakan ekosistem bisnis yang transparan serta berintegritas, sejalan dengan semangat transformasi kelembagaan dan reformasi birokrasi Kementerian Hukum RI.



Mengupas Asas Contrarius Actus dan Kebebasan Berorganisasi: Kemenkum Kalsel Fasilitas Diskusi Akademik PUSHAM ULM



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum memfasilitasi pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) hasil penelitian fundamental bertema “Asas Contrarius Actus dalam Dinamika Kebebasan Berorganisasi” di Balai Pertemuan Garuda, Senin (06/10/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka diseminasi hasil riset kompetitif fundamental dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat, melalui Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM ULM).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Dewi Woro Lestari yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, serta Profesor Fakultas Hukum ULM, Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D selaku ketua peneliti. Diskusi juga menghadirkan Dosen Fakultas Hukum ULM, Arisandy Mursalin, S.H., M.H. sebagai narasumber.

Dalam paparannya, Arisandy menjelaskan bahwa asas Contrarius Actus secara harfiah berarti tindakan yang berlawanan, yakni kewenangan pejabat tata usaha negara untuk membatalkan atau mencabut keputusan yang telah diterbitkan. Asas ini pada dasarnya berfungsi sebagai koreksi administratif, namun dapat menjadi alat represi jika diterapkan tanpa kontrol hukum yang jelas.

Diskusi juga menyoroti dinamika penerapan asas tersebut dalam konteks pembatasan kebebasan berorganisasi di Indonesia, khususnya pasca revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Para peserta sepakat bahwa pembubaran organisasi harus ditempatkan sebagai langkah terakhir (ultima ratio) dan dijalankan sesuai prinsip kehati-hatian serta due process of law.

Diskusi berlangsung kondusif dengan partisipasi aktif dari akademisi, peneliti, mahasiswa serta perwakilan instansi seperti Kanwil Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Ombudsman, dan Organisasi Bantuan Hukum. Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir rekomendasi penguatan perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berorganisasi serta peran aktif Kanwil dalam pengawasan dan edukasi hukum berbasis HAM.



Era Baru Transparansi Korporasi Dimulai, Kemenkum Luncurkan Aplikasi Untuk Berantas Kejahatan Keuangan

Jakarta – Dalam rangka mewujudkan visi besar Asta Cita yang menempatkan penguatan reformasi hukum, pemberantasan korupsi, serta penciptaan iklim investasi yang sehat sebagai salah satu prioritas utama pemerintahan, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menggelar Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif sebagai langkah strategis dalam memperkuat transparansi korporasi dan memberantas kejahatan keuangan.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menyampaikan bahwa transparansi merupakan fondasi utama dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, adil, dan bersih.

“Transparansi merupakan instrumen esensial dalam menarik investasi berkualitas dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Namun, upaya transparansi ini kerap menghadapi tantangan berupa informasi asimetris, di mana identitas pemilik manfaat korporasi yang sesungguhnya disamarkan di balik struktur legal yang kompleks dan berlapis,” ujar Menkum di Graha Pengayoman, Senin (06/10/25)

Sistem yang ada saat ini pun dinilai memiliki banyak celah yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melakukan kejahatan keuangan seperti menyembunyikan hasil korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, hingga pendanaan terorisme.

Menkum menyampaikan bahwa, sebelumnya pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dengan melakukan sistem pelaporan data pemilik manfaat yang bergantung pada self-declaration. Namun ini dinilai belum optimal karena tidak didukung instrumen verifikasi yang kuat.

“Guna mengatasi tantangan mendasar ini, kita tidak dapat lagi bekerja secara parsial dan sektoral. Hari ini, kita mendeklarasikan dimulainya sebuah era baru. Berlandaskan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025, kita beralih dari paradigma self-declaration menuju verifikasi kolaboratif yang terintegrasi,” tegas Supratman.

Dalam forum ini dilakukan tiga langkah besar yang menjadi tonggak perubahan tata Kelola data pemilik manfaat, pertama adalah peluncuran aplikasi layanan sistem verifikasi beneficial ownership (BO) akan digunakan untuk memulai proses validasi data secara sistematis, guna memberikan kepastian awal bagi para pengguna. Dengan adanya aplikasi ini, efisiensi dan akurasi verifikasi data akan meningkat secara signifikan.

Kedua adalah pengenalan prototipe beneficial ownership (BO) gateway yang dirancang sebagai sistem terintegrasi yang akan memfasilitasi pertukaran dan verifikasi data BO secara digital antar kementerian dan lembaga. Ini juga diproyeksikan menjadi jembatan data yang menghubungkan Ditjen AHU dengan instansi lain seperti Ditjen Pajak, PPATK, dan ATR/BPN, untuk mewujudkan verifikasi berlapis (multipronged approach) yang direkomendasikan oleh Financial Action Task Force (FATF).

“Kita melampaui sekadar pembangunan sistem. Dengan ketersediaan data BO yang akurat melalui BO Gateway, kita membekali aparat penegak hukum dengan instrumen yang presisi untuk melakukan follow the money hingga ke akar-akarnya. Kita memberikan kepastian hukum bagi investor, yang pada gilirannya akan mendukung B-Ready, dan menempatkan Indonesia sebagai safe haven bagi investasi,” pungkas Menkum.

Langkah strategis ketiga adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen AHU dengan berbagai K/L strategis dan dilanjutkan dengan Kick Off Meeting BO Gateway. Sesi diskusi interaktif ini menghadirkan narasumber dari PPATK, Stranas PK, Ditjen Pajak, Kementerian ESDM, dan Pertamina untuk membahas strategi, tantangan, dan implementasi tata kelola kolaboratif ke depan.

Forum ini dihadiri secara langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyo; Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasaran, Yusril Ihza Mahendra; serta perwakilan dari puluhan kementerian dan lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Melalui serangkaian inisiatif ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan data Pemilik Manfaat yang valid dan akurat, demi memperkuat penegakan hukum dan transparansi korporasi di Indonesia.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyambut positif peluncuran sistem verifikasi beneficial ownership (BO) oleh Kementerian Hukum sebagai langkah konkret memperkuat transparansi korporasi dan pencegahan kejahatan keuangan. “Inovasi ini menandai era baru keterbukaan data korporasi yang tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan terpercaya. Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan siap mendukung implementasinya secara menyeluruh di daerah,” ujar Alex.



Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Ikuti Webinar OKE KI Seri #33 : Bahas Pencatatan KIK

Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti kegiatan Webinar Obrolan Kreatif Edukatif (OKE) KI seri #33 dengan tema “Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai Langkah Awal Pelindungan Defensive”, pada Senin (6/10/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum ini diikuti oleh ASN dan pegawai bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.

Webinar menghadirkan dua narasumber utama, yakni Ibu Laina Sumarlina Sihotang, Analis Kebijakan Muda DJKI, dan Bapak Hery P. Manurung, Pamong Budaya Ahli Pertama dari Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan.

Dalam paparannya, Ibu Laina menjelaskan pentingnya pemahaman mengenai dasar-dasar Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), tujuan pencatatan, serta manfaat yang dapat diperoleh masyarakat, khususnya komunitas lokal. Ia juga menekankan peran Pusat Data KIK sebagai penguat bukti kepemilikan dan bentuk kedaulatan Indonesia atas KIK.

Sementara itu, Hery P. Manurung menyoroti peran penting pencatatan KIK sebagai bentuk defensive protection, yakni langkah pertahanan untuk mencegah klaim sepihak terhadap budaya, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal, serta Potensi Indikasi Geografis (PIG). Ia juga menambahkan bahwa Pusat Data KIK nantinya akan menjadi acuan internasional dan terhubung dengan lembaga-lembaga global yang relevan.

Kegiatan yang berlangsung interaktif ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman dan peran aktif dalam pelindungan kekayaan intelektual komunal di daerah.



Menkum Mediasi Dualisme PPP, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Jadi Wakilnya



Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah terakhir. Hari ini, Senin (06/10/2025) Supratman mengesahkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum Nomor M.HH-15.AH.11.02 TAHUN 2025 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2025-2030. SK tersebut menyatakan H. Muhamad Mardiono sebagai ketua umum dan Agus Suparmanto sebagai wakil ketua umum.

"Sudah ada SK terbaru yang diakui kedua-duanya (kubu Mardiono dan kubu Agus). Sudah rekonsiliasi. Berikan kesempatan kepada internal PPP untuk melakukan rekonsiliasi dari atas sampai ke bawah," ujar Supratman yang didampingi Mardiono dan Agus, di Kantor Kementerian Hukum.

Supratman menjelaskan bahwa internal PPP telah melakukan konsolidasi nasional dalam jajaran kepengurusan di semua tingkatan. Kemudian, PPP mengajukan permohonan dengan Nomor Surat 4068/ EX/ DPP/ X/ 2025 tanggal 03 Oktober 2025, hal Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2025-2030. Ia berharap kepengurusan PPP yang baru dapat segera susunan kepengurusan yang lengkap.

"Kami berharap sesegara mungkin untuk bisa melengkapi susunan kepengurusan yang lengkap dan Kementerian Hukum siap untuk menerbitkan SK. Saya mohon dalam waktu yang dekat," pintanya.

Ketua Umum PPP, Mardiono, mengatakan ia telah melakukan pertemuan dengan pihak Agus Suparmanto sehingga perbedaan-perbedaan yang ada dapat direkonsiliasi. Dengan bersatunya Mardiono dan Agus, maka jajaran di bawah mereka juga akan disatukan dalam kepengurusan yang baru.

"Nanti di bawah kami juga disatukan melalui kepengurusan yang segera disempurnakan, yaitu melalui forum Mukernas. Saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah," ungkap Mardiono.

Sementara itu, Agus sebagai wakil ketua umum yang baru mengatakan bahwa saat ini PPP sedang berada di masa transisi. PPP akan melakukan semua proses sesuai mekanisme partai.

"Ini merupakan sejarah. Dalam hal rekonsiliasi ini semoga apa yang kita bangun terutama PPP ini bisa bangkit lagi dan berkiprah di bangsa Indonesia," tuturnya.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem menyambut positif langkah Kementerian Hukum dalam memediasi dan menyelesaikan dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Langkah mediasi yang difasilitasi langsung oleh Menteri Hukum menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas politik nasional melalui pendekatan hukum yang konstruktif. Keputusan ini bukan hanya mengakhiri dualisme, tetapi juga menjadi contoh nyata bahwa mekanisme hukum dapat menjadi jalan rekonsiliasi dalam kehidupan berorganisasi dan berpolitik," ujar Alex.



Perkuat Sinergi Layanan, Kakanwil Kemenkum Kalsel Terima Kunjungan Bank Mandiri

Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menerima kunjungan jajaran Bank Mandiri Kalimantan Selatan, pada Selasa (19/08/2025) di ruang kerja Kakanwil. Kunjungan ini dipimpin oleh Puguh Jati Tri Saroso, Vice President Bank Mandiri Kalimantan Selatan, didampingi M. Hafiz Alfatani, Assistant Vice President, Galih Setiawan, Branch Manager Banjarmasin (Pangeran Samudera), serta jajaran lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Alex Cosmas Pinem didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi, membahas peluang kerja sama strategis antara Kemenkum Kalsel dan Bank Mandiri, terutama dalam mendukung pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan Kemenkum Kalimantan Selatan.

Kakanwil Alex Cosmas Pinem menyampaikan apresiasi dan harapannya atas jalinan silaturahmi ini.

“Kami menyambut baik kunjungan dari Bank Mandiri. Sinergi ini menjadi langkah positif dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan efisien, serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kemenkum di wilayah Kalimantan Selatan,” ujar Alex.

Sementara itu, Puguh Jati Tri Saroso menyampaikan apresiasi atas penerimaan yang baik dari Kemenkum Kalsel serta komitmen Bank Mandiri untuk terus memperluas dukungan bagi instansi pemerintah.

“Kami berterima kasih atas kesempatan ini. Bank Mandiri siap bersinergi dan memberikan solusi layanan perbankan yang mendukung kebutuhan operasional maupun pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenkum Kalsel,” tutur Puguh.

Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mempererat kerja sama kelembagaan antara Kemenkum Kalimantan Selatan dan Bank Mandiri, sejalan dengan semangat membangun sistem pelayanan publik yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kemudahan layanan.



Kanwil Kemenkum Kalsel Dukung Penguatan Pelayanan Hukum Melalui Rakor Direktorat Perdata

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Perdata, yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dari Kantor Wilayah di seluruh Indonesia. Dari Kanwil Kemenkum Kalsel, kehadiran diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, serta Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Direktur Perdata, Henry Sulaiman, dan membahas langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan tugas serta peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah, khususnya dalam penanganan pelayanan hukum perdata dan kewenangan Administrasi Hukum Umum.

Terkait kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi sarana penting untuk memperkuat sinergi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan hukum.

“Rapat ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah antara pusat dan daerah, agar setiap kebijakan dan layanan hukum perdata dapat dijalankan secara selaras, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Meidy.

Melalui forum ini, diharapkan terwujud kesamaan persepsi dan sinergi kerja antara Ditjen AHU dan seluruh jajaran Kanwil dalam mewujudkan pelayanan hukum yang efektif, transparan, dan berintegritas di seluruh Indonesia.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti FGD Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Migas, Dukung Asta Cita ke-2

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berpartisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Minyak dan Gas Bumi dalam Mendukung Swasembada Energi (Asta Cita ke-2) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, pada Selasa (7/10/2025) secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Kegiatan FGD ini merupakan bagian dari upaya strategis BPHN dalam melaksanakan fungsi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan guna memperkuat kerangka hukum yang mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana, yang mengikuti kegiatan ini bersama Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel.

Melalui forum tersebut, para peserta mendapatkan paparan dari berbagai narasumber, antara lain dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta pemaparan dari Ketua Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Dwi Agustine Kurniasih.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh perwakilan Kepala BPHN, Audy Murfi selaku Penyuluh Hukum Ahli Utama, yang menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan hukum di sektor migas dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-2, yaitu mewujudkan swasembada energi berbasis kemandirian dan keberlanjutan.

Kepala Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana mewakili Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang penting bagi jajaran Kanwil untuk memperkuat wawasan dalam mendukung analisis kebijakan hukum sektor strategis.

“FGD ini sangat bermanfaat sebagai sarana evaluasi terhadap regulasi yang mengatur sektor migas agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan energi nasional. Kami siap menindaklanjuti hasil pembahasan untuk memperkuat peran Kanwil dalam mendukung kebijakan hukum yang berdaya guna,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung dengan interaktif, diakhiri dengan sesi diskusi dan penutupan oleh panitia BPHN.



Komitmen Perkuat Reformasi Hukum, Kemenkum Kalsel Dampingi Pemda Sampaikan Sanggahan Penilaian IRH 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum mengikuti kegiatan Penyampaian Catatan Klarifikasi (Sanggha) Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 bersama BSK Hukum Pusat pada Selasa (7/10). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat BerAKHLAK Kanwil Kemenkum Kalsel serta diikuti secara daring.

Kanwil Kemenkum Kalsel diwakili oleh Eldy Prasetya Setiawan, selaku Ketua Tim Kerja Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Tim Kerja BSK Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BSK Hukum Pusat, dan Tim Penilai IRH Nasional serta sejumlah Bagian Hukum Pemerintah Daerah, yaitu Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tapin, serta Pemerintah Kota Banjarbaru.

Forum ini menjadi wadah komunikasi dan klarifikasi antara pemerintah daerah dan BSK Hukum Pusat untuk memastikan proses penilaian IRH berjalan transparan, akurat, dan objektif. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi terhadap hasil penilaian IRH Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyoroti penilaian pada indikator analisis dan evaluasi Peraturan Daerah serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dengan menyampaikan tambahan data dukung kegiatan yang sempat belum terunggah pada saat penilaian berlangsung. Pemerintah Kabupaten Tabalong juga menyampaikan sanggahan terkait data tindak lanjut hasil analisis Perda yang telah diperbaiki dan akan dipertimbangkan ulang oleh BSK Hukum Pusat.



Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyampaikan klarifikasi pada indikator evaluasi produk hukum, namun dinilai belum memenuhi kelengkapan data pendukung sehingga belum dapat diterima. Pemerintah Kota Banjarbaru turut mengajukan sanggahan pada variabel e-report JDIH, tetapi tidak dapat diproses karena data dukung yang digunakan masih berasal dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tapin berhasil mendapatkan penerimaan sanggahan setelah BSK Pusat menyatakan kelengkapan data dan keabsahan dokumen analisis yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Forum berlangsung dalam suasana konstruktif dan interaktif dengan semangat kolaboratif seluruh peserta, nantinya seluruh hasil pleno sanggha untuk dijadikan bahan evaluasi dan penyusunan strategi peningkatan skor IRH pada tahun berikutnya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan reformasi hukum di Kalimantan Selatan dapat terus diperkuat melalui tata kelola kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja hukum di daerah.



Kanwil Kemenkum Kalsel dan Dinas Koperasi Banjarmasin Mantapkan Langkah Percepatan Pendaftaran Merek Kolektif

Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan kegiatan koordinasi tindak lanjut perkembangan pengajuan permohonan pendaftaran Merek Kolektif bersama Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Selasa (7/10). Kegiatan berlangsung di Kantor Dinas Koperasi UMKM Banjarmasin dan dihadiri oleh tim dari perwakilan kedua instansi.

Koordinasi ini bertujuan menindaklanjuti perkembangan pengajuan pendaftaran Merek Kolektif “Produk Barang/Jasa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih” (KDMP) yang digagas untuk melindungi identitas serta menjamin kualitas produk koperasi di Kota Banjarmasin. Melalui merek kolektif ini, diharapkan koperasi memiliki instrumen hukum yang mampu memperkuat branding daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, kedua pihak membahas penyusunan rencana percepatan pendaftaran merek, pendampingan teknis oleh Kanwil Kemenkum Kalsel, serta identifikasi hambatan teknis di lapangan. Fokus pendampingan diarahkan pada empat gerai koperasi yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai percontohan pendaftaran merek kolektif.

Melalui sinergi ini, diharapkan diperoleh data terkini mengenai status masing-masing koperasi, serta disepakati langkah-langkah percepatan pendaftaran dan rencana tindak lanjut berupa kunjungan lapangan ke gerai-gerai koperasi terkait.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan koperasi melalui perlindungan kekayaan intelektual. Diharapkan, pendaftaran Merek Kolektif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat segera terealisasi sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor yang memperkuat identitas dan daya saing produk lokal di Kota Banjarmasin.



Komitmen Berintegritas, Kanwil Kemenkum Kalsel Jalani Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK

Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Desk Wawancara Penilaian Mandiri Verifikasi Lapangan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Rabu (8/10/2025) bertempat di Balai Pertemuan Garuda.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai, mulai dari Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat manajerial dan non manajerial, hingga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pelaksanaan desk wawancara ini merupakan tindak lanjut dari surat Inspektur Wilayah V Kementerian Hukum RI Nomor ITJ.6-PW.02.04-46 tanggal 24 September 2025 tentang pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Hukum RI.

Kegiatan penilaian dilakukan oleh tim penguji yang hadir secara luring dan daring. Tim penguji melakukan pemeriksaan dan wawancara terhadap pelaksanaan program kerja, komitmen integritas, serta inovasi pelayanan yang telah diterapkan.

Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan room tour pelayanan oleh tim penguji untuk melihat secara langsung kondisi nyata dan implementasi layanan publik di unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel. Kunjungan ini menjadi bentuk verifikasi lapangan terhadap kesiapan dan konsistensi pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK.

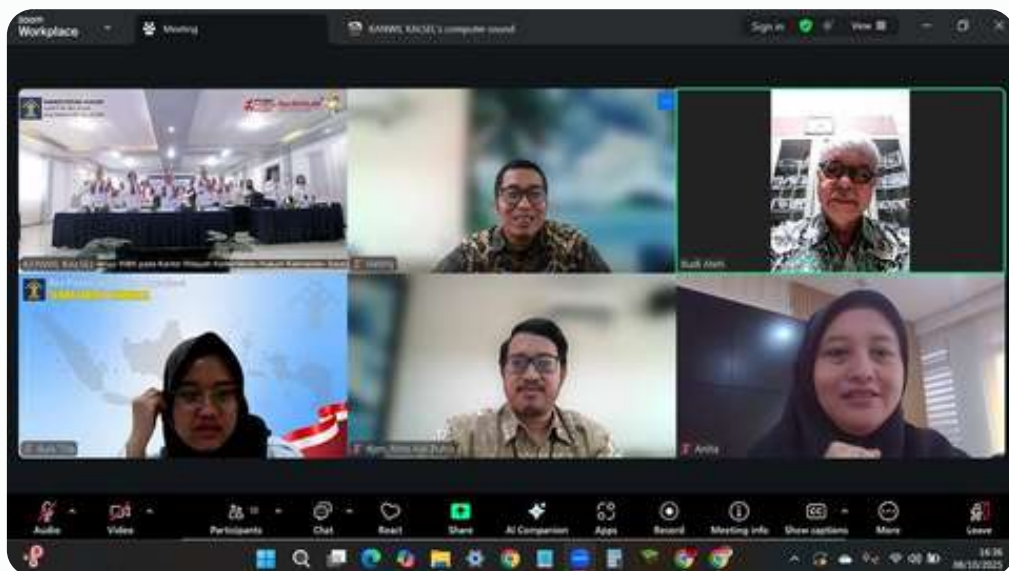
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Pembangunan Zona Integritas bukan hanya soal penilaian, tetapi tentang budaya kerja yang berorientasi pada integritas, transparansi, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui evaluasi ini, kita buktikan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel siap menjadi satuan kerja berpredikat WBK,” ujar Alex.

Sebagai penutup, Alex Cosmas Pinem menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai serta tim evaluator atas kolaborasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim dan pegawai yang telah berkontribusi secara maksimal. Terima kasih pula kepada tim penilai yang telah memberikan masukan konstruktif. Semoga sinergi ini semakin memperkuat semangat kita untuk mewujudkan Kanwil Kemenkum Kalsel sebagai satuan kerja yang berintegritas dan melayani dengan sepenuh hati,” ungkapnya.

Dengan semangat kebersamaan dan kesiapan seluruh pegawai, kegiatan desk wawancara serta verifikasi lapangan ini berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme. Hasil evaluasi diharapkan semakin memperkuat tekad Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang unggul, berintegritas, dan bebas dari korupsi.



Dari Kotabaru, Kemenkum Kalsel Kobarkan Semangat Hukum Berkeadilan



Kotabaru, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Hukum hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Hukum yang diselenggarakan di Kabupaten Kotabaru.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparaturnya pemerintah daerah dan masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memperkuat kesadaran hukum di lingkungan pemerintahan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Kanwil Kemenkum Kalsel menyampaikan materi terkait pentingnya pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mendorong pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan asas kepastian dan keadilan hukum.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses pembentukan dan penerapan regulasi di daerah, serta mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten Kotabaru atas terselenggaranya kegiatan ini.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum merupakan kunci dalam memperkuat budaya sadar hukum di masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung dengan antusias, diikuti oleh peserta dari unsur perangkat daerah, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Kotabaru.



Kawal Kelestarian Sungai, Kemenkum Kalsel Harmonisasi Penyusunan Raperda Garis Sempadan Sungai Banjarbaru



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui melaksanakan kegiatan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Garis Sempadan Sungai, Kamis (9/10).

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Kemenkum Kalsel terhadap Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menciptakan regulasi yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan nasional, sekaligus memperkuat pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

Harmonisasi dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Eryck Yulianto dan didampingi tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel bersama perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam proses pembahasan, tim memberikan penyempurnaan terhadap sejumlah pasal dan dasar hukum, termasuk penambahan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, agar sesuai dengan ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, masukan juga diberikan untuk memperkuat substansi pengaturan mengenai penetapan, pemanfaatan, dan pengawasan sempadan sungai, serta penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran tata ruang.

Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Kalsel memastikan Raperda yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum, melindungi kelestarian sungai, dan mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kota Banjarbaru.



Sinergi Hukum Daerah: Kemenkum Kalsel Serahkan Hasil Harmonisasi Raperda Sempadan Sungai



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan serahkan hasil harmonisasi Raperda Kota Banjarbaru tentang Garis Sempadan Sungai pada, Kamis (9/10).

Penyerahan dilakukan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari proses harmonisasi yang sebelumnya telah dibahas secara langsung dan telah memanfaatkan aplikasi e-Harmonisasi bersama tim perancang Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dalam kesempatan tersebut, Anton menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banjarbaru atas kepercayaannya kepada Kanwil Kemenkum Kalsel dalam proses harmonisasi Raperda.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan dan kerja sama yang baik dari Pemerintah Kota Banjarbaru. Sinergi seperti ini penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah tidak hanya selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga memiliki manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Anton.

Ia menambahkan bahwa harmonisasi ini bukan sekadar tahapan administratif, melainkan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta menjaga keberlanjutan fungsi sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat.



Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Harmonisasi Ranperda Kawasan Tanpa Rokok Kota Banjarmasin

Banjarmasin, Humas_Info – Pada Kamis, 9 Oktober 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Banjarmasin tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang berlangsung di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, didampingi Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Muhammad Novi Saputra. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Banjarmasin, Hendra, serta Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Emma Ariesnawati, bersama jajaran Satpol PP dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.



Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok disusun sebagai penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, terutama pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ranperda ini bertujuan memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, baik bagi perokok aktif maupun pasif, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di fasilitas publik, tempat kerja, serta area umum lainnya.

Dalam arahannya, Anton Edward Wardhana menegaskan bahwa proses harmonisasi ini merupakan bentuk nyata dari upaya penyelarasan antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

“Harmonisasi ini bukan hanya soal kesesuaian norma, tetapi juga memastikan bahwa substansi pengaturan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kawasan Tanpa Rokok merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak warga untuk mendapatkan udara bersih dan lingkungan yang sehat,” ujarnya.

Anton juga menambahkan bahwa keberhasilan penerapan KTR sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah daerah, aparat penegak, maupun masyarakat. “Regulasi yang baik harus diiringi dengan edukasi dan penegakan yang konsisten agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Melalui kegiatan harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Kalsel terus berkomitmen mendukung Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas, adaptif, dan berpihak pada kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

Pelantikan Notaris Pengganti, Wujud Komitmen Kemenkum Kalsel dalam Menjaga Pelayanan Hukum



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris Pengganti Kota Banjarmasin di Balai Pertemuan Garuda, Kamis (09/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, beserta pejabat struktural di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum, perwakilan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Banjarmasin, serta Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Banjarmasin.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, mewakili Kepala Kantor Wilayah Alex Cosmas Pinem dalam memimpin langsung jalannya pelantikan. Pada kesempatan tersebut, dilakukan pelantikan Theresia Isnawi Widiastuti, S.H. sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Gaby Siantori, S.H., M.Kn.

Dalam sambutannya, Meidy menyampaikan bahwa pelantikan Notaris Pengganti bukan sekadar seremoni formal, melainkan wujud kehadiran negara dalam menjamin keberlangsungan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya bagi Notaris Pengganti untuk menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas, serta memastikan pemenuhan kewajiban terkait Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai bentuk akuntabilitas profesi.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan kenotariatan di Kota Banjarmasin, sejalan dengan semangat peningkatan kualitas pelayanan hukum yang berintegritas di wilayah Kalimantan Selatan.



Lewat MoU dan PKS, Kemenkum Kalsel Dampingi DPRD Tabalong Wujudkan Produk Hukum Daerah yang Aspiratif



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, Analisis Kebijakan Hukum, dan Pelayanan Hukum, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Kamis (9/10/2025).

Penandatanganan ini dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, dan Ketua DPRD Kabupaten Tabalong, Riza Fahlipi yang diwakili Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tabalong, Sumiati serta disaksikan langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah.

Kesepakatan bersama ini menjadi dasar kerja sama antara kedua pihak dalam peningkatan kualitas pembentukan produk hukum daerah, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum, serta pelayanan hukum di Kabupaten Tabalong. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi penelitian dan pengkajian bidang hukum, penyusunan rancangan produk hukum daerah, mediasi dan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, serta fasilitasi pelayanan konsultasi dan bantuan hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara Kemenkum dan lembaga legislatif daerah untuk menciptakan produk hukum yang responsif dan berkualitas.

“Kerja sama ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam membangun sistem hukum daerah yang adaptif dan partisipatif. Melalui sinergi ini, Kemenkum berkomitmen mendampingi DPRD Tabalong dalam setiap tahapan penyusunan peraturan daerah agar selaras dengan prinsip hukum nasional dan kebutuhan masyarakat,” ujar Alex.

Sementara itu, Sumiati, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tabalong yang mewakili Ketua DPRD Tabalong dalam penandatanganan tersebut, menyampaikan apresiasinya atas terjalannya kerja sama ini. “Melalui kerja sama ini, kami berharap proses penyusunan peraturan daerah di Tabalong dapat semakin terarah, sesuai kebutuhan daerah, serta memiliki dasar akademik dan yuridis yang kuat. Sinergi dengan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan ini menjadi langkah nyata untuk menghadirkan regulasi yang tidak hanya taat asas, tetapi juga implementatif dan berdaya guna bagi masyarakat,” ujar Sumiati.

Tindak lanjut dari kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong dan Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, yang mencakup fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong, antara lain tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Kepala Divisi PPPH, Anton Edward Wardhana, menyebutkan bahwa kerja sama ini diharapkan mempercepat proses pembentukan peraturan daerah yang berkualitas dan sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan. “Fasilitasi ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Kalsel untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki landasan akademik yang kuat dan mendukung pembangunan daerah berbasis hukum,” tutur Anton.

Melalui kerja sama ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan terus memperluas perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan sistem hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan pembentukan peraturan yang efektif untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Tabalong.

Lewat MoU dan PKS, Kemenkum Kalsel Dampingi DPRD Tabalong Wujudkan Produk Hukum Daerah yang Aspiratif

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, Analisis Kebijakan Hukum, dan Pelayanan Hukum, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Kamis (9/10/2025).

Penandatanganan ini dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, dan Ketua DPRD Kabupaten Tabalong, Riza Fahlipi yang diwakili Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tabalong, Sumiati serta disaksikan langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah.

Kesepakatan bersama ini menjadi dasar kerja sama antara kedua pihak dalam peningkatan kualitas pembentukan produk hukum daerah, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum, serta pelayanan hukum di Kabupaten Tabalong. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi penelitian dan pengkajian bidang hukum, penyusunan rancangan produk hukum daerah, mediasi dan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, serta fasilitasi pelayanan konsultasi dan bantuan hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara Kemenkum dan lembaga legislatif daerah untuk menciptakan produk hukum yang responsif dan berkualitas.

“Kerja sama ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam membangun sistem hukum daerah yang adaptif dan partisipatif. Melalui sinergi ini, Kemenkum berkomitmen mendampingi DPRD Tabalong dalam setiap tahapan penyusunan peraturan daerah agar selaras dengan prinsip hukum nasional dan kebutuhan masyarakat,” ujar Alex.

Sementara itu, Sumiati, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tabalong yang mewakili Ketua DPRD Tabalong dalam penandatanganan tersebut, menyampaikan apresiasinya atas terjalinnya kerja sama ini.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap proses penyusunan peraturan daerah di Tabalong dapat semakin terarah, sesuai kebutuhan daerah, serta memiliki dasar akademik dan yuridis yang kuat. Sinergi dengan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan ini menjadi langkah nyata untuk menghadirkan regulasi yang tidak hanya taat asas, tetapi juga implementatif dan berdaya guna bagi masyarakat,” ujar Sumiati.

Tindak lanjut dari kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong dan Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, yang mencakup fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong, antara lain tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Kepala Divisi PPPH, Anton Edward Wardhana, menyebutkan bahwa kerja sama ini diharapkan mempercepat proses pembentukan peraturan daerah yang berkualitas dan sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Fasilitasi ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Kalsel untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki landasan akademik yang kuat dan mendukung pembangunan daerah berbasis hukum,” tutur Anton.

Melalui kerja sama ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan terus memperluas perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan sistem hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan pembentukan peraturan yang efektif untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Tabalong.



Verifikasi Lapangan SKM, SPAK, dan SPKP di Kanwil Kemenkum Kalsel Resmi Tuntas, Tim BSK Hukum Sampaikan Laporan Tertulis

Banjarmasin, Humas_Info - Kegiatan Verifikasi Lapangan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan resmi berakhir pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Lapangan dari Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) sejak tanggal 7 hingga 9 Oktober 2025, sebagai bagian dari Penilaian Mandiri Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Selama pelaksanaan, tim melakukan pengecekan dan validasi terhadap hasil survei SKM, SPAK, dan SPKP yang sebelumnya telah dilaksanakan secara digital oleh seluruh satuan kerja melalui aplikasi 3AS (Transparent, Informative, Great, Action, Actual, and Synergy). Verifikasi ini bertujuan memastikan kesesuaian antara data survei dengan kondisi nyata di lapangan serta menilai implementasi nilai integritas dan kualitas pelayanan publik di setiap satuan kerja.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim BSK Hukum atas pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, verifikasi lapangan menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas layanan publik sekaligus menjaga semangat anti korupsi di seluruh jajaran.

“Verifikasi lapangan ini tidak hanya memvalidasi hasil survei, tetapi juga memastikan bahwa semangat integritas dan pelayanan yang prima benar-benar dijalankan serta dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Tim BSK Hukum dalam kesempatan penutupan kegiatan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas dukungan penuh dari jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel selama proses verifikasi berlangsung.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan keterbukaan seluruh jajaran Kanwil Kalimantan Selatan. Semoga komitmen dan budaya integritas yang sudah terbentuk dapat terus dijaga untuk mendukung terwujudnya Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum,” ujar perwakilan tim saat berpamitan.

Dengan selesainya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel diharapkan dapat terus memperkuat upaya peningkatan mutu pelayanan publik dan memastikan setiap satuan kerja tetap konsisten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.



Kanwil Kemenkum Kalsel Dukung Penguatan Inovasi Desa Melalui Pelindungan Kekayaan Intelektual



Banjarmasin, KI_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual turut berperan aktif dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan dan Publikasi Inovasi Desa 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan, pada Selasa (7/10/2025) bertempat di Ball Room Hotel Nasa Banjarmasin.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 peserta yang terdiri atas para kepala desa, camat, dan tokoh masyarakat dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Hadir sebagai narasumber dari Kanwil Kemenkum Kalsel, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, yang memaparkan pentingnya pelindungan hukum terhadap inovasi dan produk unggulan desa melalui pendaftaran kekayaan intelektual (KI).

Acara dibuka oleh Mugiharto Wakhmadi, Koordinator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pendaftaran merek menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya saing produk desa dan menjaga keberlanjutan usaha masyarakat.

Dalam paparannya, Riswandi menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan memiliki banyak produk unggulan daerah (PUD) yang potensial namun belum seluruhnya memperoleh pelindungan hukum.

“Pendaftaran merek dan kekayaan intelektual lainnya memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal, sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Pada sesi diskusi, peserta antusias menanyakan berbagai aspek pelindungan KI, seperti mekanisme pendaftaran indikasi geografis, paten untuk teknologi tepat guna, serta tata cara pengajuan merek kolektif. Riswandi menjelaskan bahwa produk dengan kekhasan daerah seperti gula aren Tirawan dan kayu manis Loksado dapat memperoleh pelindungan melalui Indikasi Geografis (IG), yang berperan penting dalam meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendorong pelindungan serta komersialisasi kekayaan intelektual.

“Melalui KI, inovasi desa bisa diangkat menjadi identitas ekonomi daerah yang berdaya saing tinggi,” tambahnya.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme. Para peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan aspirasi terkait pengembangan produk unggulan daerah berbasis inovasi.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan pemahaman masyarakat desa mengenai pentingnya pelindungan kekayaan intelektual semakin meningkat, sehingga inovasi desa dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kalimantan Selatan.



Semakin AKRAB, Kemenkum Kalsel Dorong Kesadaran Merek dan HKI bagi Pelaku UMKM dan Pariwisata Tanah Laut



Tanah Laut, Yankum_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Tahun 2025 pada Jumat, 10 Oktober 2025 di Algoritma Resto Ballroom, Lantai 3, Kabupaten Tanah Laut.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, pelaku UMKM, komunitas budaya, serta akademisi lokal. Acara dibuka secara resmi oleh Kabid Ekonomi Kreatif, Kelembagaan, dan Pengembangan SDM Pariwisata, Liza Verawaty, S.Sos, setelah diawali dengan penampilan tari daerah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sambutan dari perwakilan Plt. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel serta Zulpuaddin, S.Sos dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.

Dalam kegiatan yang mengusung tema “Membangun Kesadaran Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual” ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah, hadir sebagai narasumber utama. Meidy menjelaskan bahwa perlindungan HKI, khususnya merek, menjadi langkah penting dalam membangun daya saing pelaku ekonomi kreatif daerah.

“Kesadaran akan pentingnya HKI adalah fondasi utama untuk menjaga keaslian karya dan produk lokal. Dengan pendaftaran merek, pelaku UMKM dan komunitas budaya dapat memperoleh perlindungan hukum serta nilai tambah ekonomi dari hasil karyanya,” ungkap Meidy.

Ia juga menambahkan, Kemenkum Kalsel siap memfasilitasi dan memberikan pendampingan langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mendaftarkan mereknya.

“Melalui helpdesk KI, kami hadir lebih dekat ke masyarakat agar proses pendaftaran merek bisa dilakukan dengan mudah, cepat, dan terarah,” lanjutnya.

Usai sesi talkshow, kegiatan dilanjutkan dengan fasilitasi dan konsultasi pendaftaran merek, di mana peserta memperoleh bimbingan langsung dari operator Helpdesk KI Kemenkum Kalsel terkait prosedur, persyaratan, dan pengajuan awal pendaftaran merek.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi atas sinergi positif antara Kemenkum Kalsel dan Dinas Pariwisata dalam meningkatkan literasi HKI di daerah.

“Upaya bersama ini patut diapresiasi. Edukasi dan fasilitasi HKI seperti ini tidak hanya melindungi karya masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas ekonomi kreatif daerah,” ujar Alex.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya perlindungan HKI semakin meningkat, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan. Keterlibatan Kemenkum Kalsel juga sebagai bagian dari Program AKRAB Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yaitu Aksi Kemenkum Kalsel Rajin Bagawi dalam upaya mendekatkan dan senantiasa memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan publik.



Kemenkum Kalimantan Selatan Hadiri Grand Final Utuh Aluh Sasirangan 2025



Banjarbaru, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, menghadiri Grand Final Pemilihan Utuh Aluh Sasirangan Kalimantan Selatan 2025 yang diselenggarakan pada Sabtu malam (11/10/2025) di Lapangan dr. Murjani, Kota Banjarbaru.

Kegiatan yang digelar oleh Yayasan Pencinta Sasirangan (YPS) dan Masyarakat Pemilik Indikasi Geografis (MPIG) Sasirangan Kalimantan Selatan ini merupakan ajang tahunan dalam rangka melestarikan dan mempromosikan kain khas daerah Sasirangan sebagai warisan budaya sekaligus produk indikasi geografis yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan.

Rangkaian acara dimulai dengan penampilan hiburan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sasirangan, doa bersama, serta sambutan dari Ketua Panitia dan Ketua YPS. Pada kesempatan tersebut, Kemenkum Kalimantan Selatan juga menerima penghargaan sebagai Mitra Strategis atas peran aktif dalam pelindungan Kekayaan Intelektual, khususnya Indikasi Geografis Sasirangan.

Acara dilanjutkan dengan penampilan finalis Utuh dan Aluh Sasirangan, tarian tradisional Banjar, parade busana Sasirangan, serta penobatan pemenang Utuh dan Aluh Sasirangan 2025.





**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](#)



[@kemenkumkalsel](#)



[kalsel.kemenkum.go.id](#)